

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (Studi di UPTD Puskesmas Cikalong Kabupaten Tasikmalaya)

Dudi Gandana

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: *dudigundana@gmail.com

ABSTRAK

Pusat Kesehatan Masyarakat atau disebut dengan Puskesmas merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. UPTD Puskesmas Cikalong Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan tujuan pelayanan dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel, dimana dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan mengungkap faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pada UPTD Puskesmas Cikalong Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara secara mendalam. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan dalam Implementasi Peraturan Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat di UPTD Puskesmas Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kesesuaian pelaksanaan tugas dengan standar yang telah ditentukan, sumber daya yang dimiliki pelaksana kebijakan, sikap dari para pelaksana kebijakan, hubungan antar organisasi dan lingkungan yang ada dalam mendukung terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kesimpulan penelitian bahwa dalam mencapai pelayanan yang efisien, efektif dan akuntabel harus memenuhi standar pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci : Implementasi Peraturan dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan menekankan pada peningkatan kesehatan ibu dan anak karena siklus antargenerasi dalam pembentukan human capital terkait kesehatan. Pendapatan keluarga yang baik, secara tidak langsung dapat meningkatkan kesehatan dan pendidikan yang dapat menentukan perkembangan anak yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesehatan pada masa remaja dan kemungkinan memperoleh pendapatan di masa dewasa serta akan menentukan kualitas hidup bagi generasi penerus bangsa. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada saat ini merupakan masalah penting, agar dapat menjaga masyarakat agar tetap sehat dalam mengisi berbagai pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Berbagai bentuk layanan kesehatan telah berdiri mulai dari rumah sakit, klinik dan bentuk layanan kesehatan lainnya baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh Swasta. Fasilitas pelayanan kesehatan yang masih menjadi tujuan masyarakat untuk memperoleh layanan bidang kesehatan baik di perkotaan maupun perdesaan yaitu Puskesmas. Puskesmas bertanggungjawab dalam berbagai bentuk pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, dengan upaya menumbuhkan kemandirian masyarakatnya untuk tetap sehat, disamping kemudahan dalam akses pelayanan, dukungan teknologi yang tepat guna yang terpadu dan berkesinambungan.

Fasilitas kesehatan puskesmas di daerah masih menunjukkan berbagai kekurangan dan kelamahan. Adapun fasilitas yang tersedia di UPTD Puskesmas Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, dari aspek pembiayaannya dilakukan melalui jaminan kesehatan BPJS baik PBI maupun non-PBI dan non-jaminan kesehatan. Fasilitas yang dimiliki terdiri dari 24 tempat tidur, UGD dan PONED, 2 dokter umum, 14 perawat, dan 14 bidan yang secara rutin berjaga yang dibantu oleh tenaga lainnya. Namun demikian dari hasil penjajagan menunjukkan pelayanan kesehatannya masih menghadapi berbagai masalah, diantaranya standar pelayanan minimal di Puskesmas Cikalong sudah ada sesuai aturan dari Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, sebagai contoh masih ditemukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung.

Temuan lainnya kapasitas yang dimiliki belum sesuai dengan yang diahrapkan, sebagai contoh sistem antrian online pasien BPJS dan Sistem Informasi Puskesmas belum dilaksanakan sesuai ketentuan target kinerja dari Dinas Kesehatan, serta dukungan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan rawat inap masih kurang, sebagai contoh keadaan ruang rawat inap sudah rusak dan terkesan kumuh serta ruang isolasi tidak sesuai standard yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persediaan alat kesehatan dan obat-obatan masih kurang, sebagai contoh masih ada pasien yang diberikan resep obat untuk pembelian dari apotek luar Puskesmas, serta sumber daya manusia sebagai tenaga kesehatan masih kurang, dimana Puskesmas Cikalong tidak memiliki dokter gigi sejak 2019, dan tenaga nutrisisionis tersedia hanya 1 orang seharusnya menurut Permenkes bagi Puskesmas Pedesaan yang rawat inap minimal tenaga nutrisisionis tersedia 2 orang.

Masalah lainnya pegawai masih kurang memiliki kepedulian atau tanggap terhadap berbagai perubahan organisasi, sebagai contoh berdasarkan informasi dari masyarakat dalam manajemen pelayanannya terkait dengan perawatan pasien masih kurang respon terhadap keluhan pasien dan perbaikan pelayanan, serta dalam melaksanakan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan masih kurang efektif dilaksanakan. Hal in kemampuan dalam berkomunikasi diantara pelaksana pelayanan kesehatan masih kurang, sebagai contoh pelayanan bidan desa dan perawat pembina desa belum bisa maksimal dalam hal pelayanan pasien BPJS.

Berdasarkan ketentuannya, setiap Puskesmas wajib memenuhi standar yang telah ditentukan, dimana paling sedikit terdiri atas Kepala Puskesmas, Kepala Tata

Usaha dan Penanggungjawab. Namun dalam hal pelaksanaannya, para Penanggungjawab kurang berperan aktif dalam hal mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Faktor ekonomi dan sosial masyarakat, dimana lebih dari sepertiga penduduk di wilayah kerja Puskesmas Cikalong terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, namun berdasarkan laporan dari masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan masih banyak yang berkunjung ke Puskesmas lain.

TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu cara berpikir tentang kebijakan publik dengan menganggapnya sebagai strategi umum yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan tugasnya. Secara lebih formal merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang disengaja yang relatif stabil yang membahas masalah-masalah yang menjadi perhatian sebagian masyarakat. Kebijakan tidak terjadi secara kebetulan, dan jarang terbentuk semata-mata karena janji kampanye dari pejabat terpilih, bahkan presiden. Meskipun pejabat terpilih sering memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan, sebagian besar hasil kebijakan adalah hasil dari perdebatan, kompromi, dan penyempurnaan yang cukup besar yang terjadi selama bertahun-tahun dan hanya diselesaikan setelah masukan dari beberapa lembaga dalam pemerintahan serta kelompok kepentingan dan organisasi. Menurut Laswell (Kencana, 2006) menyatakan: "Kebijakan adalah tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan".

Kebijakan publik dapat dikatakan sebagai strategi luas yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan tugasnya, seperangkat perilaku pemerintah yang disengaja yang relatif stabil yang menangani isu-isu yang menjadi perhatian segmen masyarakat. Sebagian besar hasil kebijakan yaitu hasil dari perdebatan, kompromi, dan penyempurnaan yang terjadi selama bertahun-tahun dan hanya diselesaikan setelah masukan dari berbagai lembaga di dalam pemerintahan. Menurut Hasswell dan Kaplan (Rusli, 2015) memberikan pendapatnya tentang kebijakan dengan menyatakan: "Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah".

Istilah kebijakan (Wahab, 2008) menyatakan: "*Policy* itu adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu". Sementara kebijakan publik umumnya mengacu pada tujuan umum sebagai tindakan pemerintah dan cara terbaik atau pilihan untuk melaksanakannya yang lebih dengan melakukan tindakan yang dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Menurut Edward III dan Sharkansky (Widodo, 2007) memberikan pengertian tentang kebijakan dengan menyatakan: "*What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of government programs*". Dari pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut sebagai bentuk kebijakan. Lahirnya sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dalam implementasinya terkadang mengalami hambatan

dan tantangan, penolakan maupun penerimaan, sehingga akan mempengaruhi terhadap pencapaian tujuannya.

Kebijakan publik dapat berupa undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan peraturan daerah yang diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan warga negara dan menjunjung moral kolektif masyarakat. Isu-isu seperti perubahan iklim, energi dan perawatan kesehatan berada di garis depan isu-isu politik utama yang dihadapi dunia saat ini. Kebijakan publik merupakan fondasi demokrasi sebuah negara dan memainkan peran penting dalam masyarakat, bekerja untuk memecahkan masalah secara efektif dan efisien melalui pertimbangan yang cermat akan kebutuhan manusia dan alam secara keseluruhan.

Banyak model yang dikembangkan dalam mencapai tujuan kebijakan, Cheema dan Rondinelli (Subarsono, 2005), faktor dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya "Kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, dan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana". Setiap model implementasi kebijakan yang dikembangkan memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga dalam penerapannya belum tentu sesuai dengan yang diharapkan, hal tersebut akan dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengukur dukungan dan hambatan terhadap implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat di UPTD Puskesmas Cikalong Kabupaten Tasikmalaya yang masih mengalami berbagai hambatan dalam mencapai keberhasilannya sesuai dengan isi kebijakan, didasarkan pada pendapatnya Grindle (Subarsono, 2008, hal. 93) dapat dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel, yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel lingkungan kebijakan.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan informan penelitian tentang pengalaman berkaitan dengan hal-hal yang terjadi dan memiliki pengetahuan luas tentang objek yang diteliti. Adapun penggunaan metode kualitatif ini yaitu untuk menganalisis tentang Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi di UPTD Puskesmas Cikalong Kabupaten Tasikmalaya).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan melakukan wawancara secara mendalam dengan informan terpilih. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, dengan teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu langkah pertama mereduksi data, mendisplay data, melakukan penarikan kesimpulan dan terakhir melakukan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan kesehatan merupakan fokus pemerintah pada saat ini, karena kesehatan merupakan modal dasar dalam proses pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pelaksanaan peraturan tersebut di atas, dimana dalam studi kebijakan publik, termasuk metode analisis kebijakan, telah menjadi salah satu bidang ilmu sosial yang paling berkembang saat ini. Analisis kebijakan muncul baik untuk lebih memahami proses pembuatan kebijakan maupun untuk memberikan pengetahuan yang andal dan relevan kepada pembuat kebijakan tentang masalah ekonomi dan sosial yang mendesak. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan tentang Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPTD Puskesmas Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

Pemberikan layanan kesehatan kepada masyarakat memiliki berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Masyarakat yang melakukan kunjungan pelayanan kesehatan ke Puskesmas Cikalong pada umumnya menyatakan keberadaan puskesmas sangat membantu masyarakat untuk melakukan perawatan kesehatannya, namun demikian masih dibutuhkan kelengkapan tenaga kesehatan maupun sarana dan prasarananya, sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. Hasil penelitian dan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa keberadaan UPTD Puskesmas Cikalong Kabupaten Tasikmalaya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan sasaran yang jelas yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja puskesmas.

Pengetahuan dan kemampuan kerja setiap pegawai sangat penting untuk keberhasilan organisasi termasuk pegawai UPTD Puskemas Cikalong baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan. Meski masih ada pendapat yang sama mengenai kelengkapan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas Puskesmas, disebutkan sangat minim, tidak sesuai standar yang seharusnya. Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas. Sedangkan sarana dan prasarana merupakan salah satu sarana penunjang terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang terdiri dari gedung, laboratorium, apotek, gudang, sarana transportasi dan alat kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh masyarakat yang melakukan kunjungan pelayanan kesehatan ke Puskesmas Cikalong, dari hasil wawancara secara umum menyatakan masih kurangnya tenaga kesehatan sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dimana hasil observasi lapangan menunjukkan tidak tersedia dokter gigi, dan tenaga bidang kefarmasian yang tentu menjadi peran penting dalam memberikan pelayanan bidang kefarmasian di Puskesmas. Ketersediaan pegawai untuk menunjang pelaksanaan fungsi UPTD Puskesmas Cikalong Kabupaten Tasikmalaya sudah tersedia dengan cukup baik, meskipun masih dari beberapa bidang keahlian yang masih kurang, sementara ditinjau dari segi dukungan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas keprofesian dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat kesehatan.

Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam pencapaian tersedianya fasilitas yang lengkap, sarana prasarana dan pemeliharaan peralatan yang menunjang terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh UPTD Puskesmas Cikalong Kabupaten Tasikmalaya. Secara umum sumber daya manusia merupakan penggerak dari berbagai organisasi untuk mencapai tujuan, termasuk pada Puskesmas, dimana tenaga kesehatan dan non kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan masyarakat yang melakukan kunjungan pelayanan kesehatan ke Puskesmas Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, pada umumnya menyatakan baik tenaga pelayanan administrasi maupun tenaga kesehatan cukup respon terhadap kebutuhan pasien atau masyarakat yang membutuhkan pelayanannya. Sudah menjadi kewajiban petugas di Puskesmas memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya.

Peran dan fungsi UPTD Puskesmas Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat signifikan sebagai fasilitas layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan akan sangat mempengaruhi terhadap kualitas pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Cikalong. Sebagai organisasi bergerak di bidang kesehatan tentunya harus lebih memperhatikan berbagai persyaratan yang dituangkan dalam Permenkes tentang Puskesmas agar pelayanan dapat lebih berkualitas untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Dari hasil penelitian masyarakat yang melakukan kunjungan pelayanan kesehatan ke Puskesmas Cikalong terkait dengan sikap dari para petugas kesehatan di puskesmas, sebagian besar menyatakan petugas kesehatan telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan selalu merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatannya. Masyarakat pada umumnya telah mengetahui berbagai prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas, sehingga petugas selalu siap memberikan pelayanannya.

Selanjutnya dari aspek hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas Cikalong Kabupaten Tasikmalaya masih belum berjalan dengan baik, masih terdapat kendala dalam melakukan koordinasi dan kerjasama melalui komunikasi dalam mencapai keberhasilannya. Sedangkan komunikasi penting dalam perilaku organisasi, karena komunikasi yang efektif dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi, yang dapat meningkatkan semangat kerja karyawan, kepuasan kerja, dan pengakuan dengan melibatkan karyawan yang ada dalam organisasi sebagai upaya untuk meningkatkan loyalitas mereka.

Sistem komunikasi memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan upaya dan kegiatan dalam unit kerja individu antara berbagai subsistem organisasi, karena melalui komunikasi dan koordinasi antara individu dan kegiatan yang berbeda dapat diungkapkan. Selanjutnya dilihat dari kondisi lingkungan untuk keberhasilan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan fungsi Puskesmas di

UPTD Puskesmas Cikalong Kabupaten Tasikmalaya sangat penting dan dipengaruhi oleh aspek budaya organisasi dan aspek keterlibatan karyawan dalam organisasi. Pencapaian keberhasilan tugas puskesmas di UPTD Puskesmas Cikalong Kabupaten Tasikmalaya selalu terkendala dengan adanya pegawai yang belum terlibat langsung sehingga merasa keberadaan atau posisinya tidak diakui di UPTD Puskesmas Cikalong, hal ini sangat penting untuk memberikan pengakuan dan kontribusi terhadap keberhasilan terutama dalam mencapai pelayanan prima pada bidang kesehatan di wilayah tanggung jawabnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat masih belum sepenuhnya mencapai tujuan kebijakan secara efektif, dimana dengan kondisi nyata yang ada pada UPTD Puskesmas Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan akuntabel masih memerlukan berbagai peningkatan dari aspek fasilitas fisik, jumlah tenaga kesehatan maupun tenaga administrasi, serta kecukupan anggaran dalam memenuhi berbagai kekurangan yang ada pada puskesmas sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kencana, S. I. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta.
- Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Wahab, A. S. (2008). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses. Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.